

# PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PERTUMBUAHAN EKONOMI :<sup>16</sup>

## Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara\*

Ari Mulianta Ginting<sup>17</sup>

*The Influence of General Allocation Fund to Economic Growth : Case in North Sumatera*

Naskah diterima 9 November 2016, direvisi 28 November 2016, disetujui 6 Desember 2016

### Abstract

*General Allocation Fund (DAU) is part of the fiscal decentralization by Central Government to local government. Based on data from Central Bank, nearly 81% of local government financial in North Sumatera are supported by the DAU provided from Central Government. This study had 2 goals, the first goal is to determine the development of local revenue and expenditure and the second goal is to analyze the influence of DAU to local government in North Sumatra. This research used 33 data from local government in North Sumatra from 2006 to 2015 and using panel regression. This research found that from APBD in local government in North Sumatra are rely mostly on DAU rather than PAD. And the local government expenditure are allocated for operational expenditure rather than capital expenditure. Based on panel regression found that the growth of DAU and BM has positive and significant impact on local economic growth. The local government have to shift the political will from operational expenditure into capital expenditure, so it will effect on economic growth and public welfare.*

**Key Words:** economic growth, fiscal transfer, capital expenditure

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentrasfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Dana tersebut diberikan dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Terkait dengan DAU, dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa DAU diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai

<sup>16</sup> Terima kasih kepada Bapak Vid Adrison, S.E., M.A., Ph.D yang telah mereview naskah jurnal ini.

\* Jurnal ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian Individu yang dilakukan oleh Penulis pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI tahun anggaran 2016.

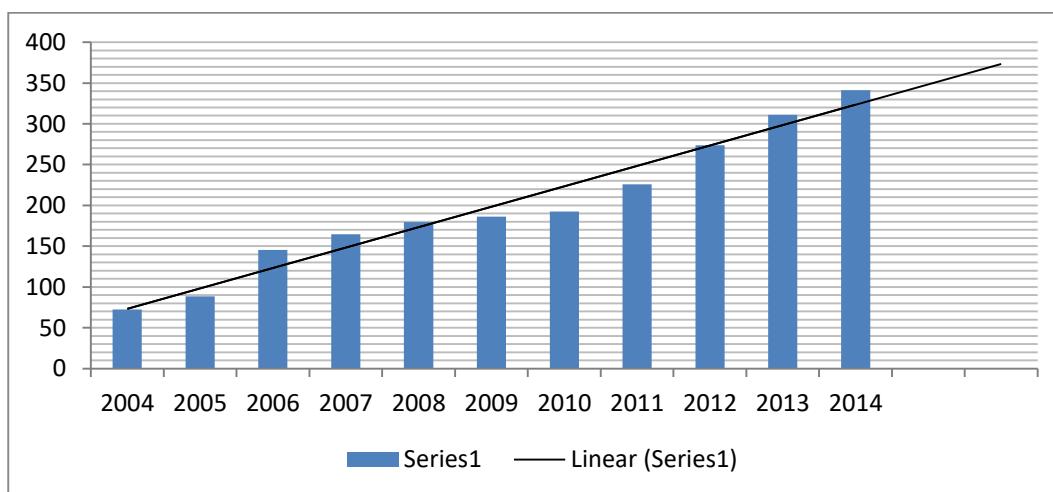
<sup>17</sup> Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan, Gedung Nusantara 1 Lantai 2. Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270, ari.ginting@dpr.go.id

salah satu alat untuk pemerataan antara ketidakmampuan daerah untuk membiaya kebutuhan pengeluaran dengan pemasukannya.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam salah satu kesempatan menguraikan bahwa DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya. Peningkatan ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan kondisi keuangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. DAU yang berikan oleh pemerintah pusat akan menjadikan sumber pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat maka diharapkan akan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah.

Transfer ke daerah dalam bentuk DAU yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang ada di seluruh Indonesia mengalami trend pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan Gambar 1. Transfer ke daerah dalam bentuk DAU pada tahun 2004 hanya sebesar Rp72,6 triliun, akan tetapi terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 17,74 % per tahun. Pada tahun 2014 jumlah transfer DAU ke daerah adalah sebesar Rp341,3 triliun, jumlah meningkat sebesar 369,97% dibandingkan dengan jumlah transfer dana DAU pada tahun 2004. Peningkatan jumlah transfer dana DAU diproyeksikan juga akan mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan pada tahun 2016, rencana transfer dana DAU yang akan diberikan pemerintah pusat adalah sebesar Rp495,5 triliun.

**Gambar 1. Perkembangan DAU Periode Tahun 2004 - 2014**



Desentralisasi fiskal dari sisi belanja didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari Pemerintah Pusat hanyalah memberikan *advice* serta *monitoring* pelaksanaannya. Sayangnya, justru dari pola inilah yang dijadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Pemerintah Daerah justru semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat, khususnya kepada dana desentralisasi fiskal dalam hal ini DAU. Ditambah lagi muncul dan maraknya perilaku korupsi para pejabat publik yang memberikan dampak lanjutan dari efek negatif seperti yang telah disebutkan diatas.

## B. Rumusan Masalah

Terkait dengan ketergantungan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dimana dari 33 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera utara hampir semua mengalami kecanduan DAU. Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, hampir 81% keuangan pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara ditopang oleh dana transfer fiskal yang berasal dari pemerintah pusat (Bank Indonesia, 2016). Selain ketergantungan akan dana transfer fiskal, pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Utara juga sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat pada tahun 2016, 7 Anggota DPRD Provinsi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengesahan anggaran (Tempo, 2016). Kondisi ini jelas tidak sehat bagi pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah.

Dalam kerangka pemahaman di atas, penelitian ini akan diarahkan untuk melihat sejauh mana DAU dapat memacu perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah dengan fokus beberapa isu atau indikator sebagai berikut: (1) Bagaimana perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; (2) Bagaimana pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara?

### C. Tujuan Analisis

Tujuan utama analisis ini adalah (1) menganalisis perkembangan pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan (2) menganalisis pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2001 di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Perubahan pola kewenangan dan kekuasaan yang terpusat secara perlahan didelegasikan kepada daerah atau dengan kata lain terdapat perubahan pola pendekatan dari sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi sendiri menurut Dwipayana (2003) memungkinkan berlangsungnya perubahan dasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas perekonomian daerah.

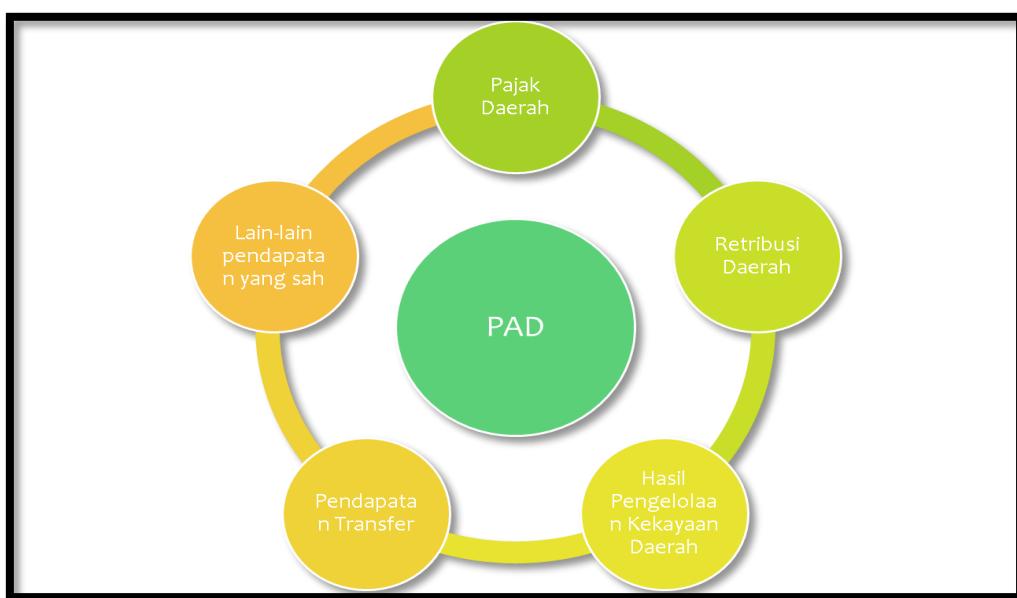
Lebih lanjut menurut Noordiawan dalam Agus Subroto (2009) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suparmoko (2002) menyatakan bahwa untuk memahami sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pusat di daerah.

Mardiasmo (2002) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa

dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat; kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas mengemukakan sumber-sumber pendapatan suatu daerah. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dan kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Semuanya masuk ke dalam PAD yang didapatkan atau berasal asli dari daerah tersebut. Sedangkan dana transfer fiskal berupa pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Lihat Gambar 2)

**Gambar 2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**



Sumber : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Penerapan otonomi daerah tersebut dilandasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri

dari pajak dan sumber daya daya alam. DAU merupakan salah satu komponen dana terbesar yang diterima daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah lain termasuk PAD.

### A. Studi Empiris Tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Penelitian mengenai pengaruh dana transfer fiskal terhadap pertumbuhan daerah pernah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah Maryanti dan Endrawati (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana desentralisasi fiskal seperti DAU, DAK, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan DAU, DAK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Fischer tahun 1996 di Amerika Serikat, mendapatkan hasil bahwa persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50 persen untuk pemerintah federal dan 60 persen untuk pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Deller (2002) lebih lanjut menemukan bahwa khususnya untuk daerah Winconsin sebesar 47 persen pendapatan pemerintah daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Di negara-negara lain, persentase tranfer atas pengeluaran pemerintah daerah adalah 85 persen di Afrika Selatan, 67-95 persen di Nigeria, dan 70-90 persen di Meksiko. Di Indonesia, pada saat sekarang, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, transfer yang dalam hal ini disamakan dengan istilahnya dengan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Maimunah (2006) melakukan penelitian mengenai DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah untuk kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kabupaten/kota yang ada di pulau Sumatera memiliki kecenderungan untuk mengandalkan DAU sebagai sumber penerimaan daerah. Dan yang menarik bahwa *terjadi flypaper effect* dari DAU yang berikan terhadap belanja daerah. Artinya setiap peningkatan DAU yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota akan meningkatkan belanja daerah.

Lebih lanjut Wijaya (2008) menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer fiskal

dari pada mengandalkan kemampuan sendiri. Menurut Adi (2008) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi PAD terhadap total belanja daerah, diantaranya adalah; (1) masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemda akan tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah; (2) rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita; dan (3) kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Padahal pendapatan daerah diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih lanjut mengenai desentralisasi fiskal, Mandala Harefa (2010) melakukan penelitian di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal melalui kebijakan melalui dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH belum dapat meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan jumlah penduduk miskin, dan mengurangi tingkat pengangguran. Bahkan yang menarik adalah terjadi temuan pelanggaran dalam penggunaan anggaran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Lin dan Liu (2000) melakukan penelitian dengan objek penelitian studi kasus di China mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah perlu meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan bahwa adanya korelasi yang kuat antara belanja investasi pada infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut Lin dan Liu (2000) mengemukakan bahwa pemberian desentralisasi fiskal kepada daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan belanja daerah yang memacu pertumbuhan ekonomi.

### III. METODOLOGI ANALISIS

#### A. Spesifikasi Model

Metodologi yang digunakan dalam analisis adalah model ekonometri berupa data panel (gabungan antara *time series* dengan *crosssection*), yang selanjutnya akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini juga akan membahas mengenai data yang digunakan dan konsep-konsep. Di samping itu, dibahas pula mengenai teknik pendugaan dan pengujian parameter yang digunakan. Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.

Menurut Tambunan (2011) pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu . Lebih lanjut Kuznet dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada alam, sumber daya manusia, modal, usaha, dan teknologi. Lebih lanjut Todaro (2000) dalam pertumbuhan ekonomi terdapat tiga komponen utama suatu perekonomian, yaitu : (a) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk jenis investasi dan modal; (b) pertumbuhan penduduk dan, (c) kemajuan teknologi.

Untuk melakukan analisis terhadap pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menggunakan *production function based* yang didasarkan kepada *framework* yang sering digunakan dalam berbagai literatur untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan fungsi *a Cobb-Douglas produksi* (Mankiw et al., 1992). Dimana :

Dimana  $y$  menunjukkan PDRB,  $k$  adalah modal atau capital,  $A$  adalah level dari teknologi, dan  $Q$  adalah tenaga kerja yang diasumsikan konstan. Sehingga berdasarkan persamaan (1) diatas dibentuk dalam bentuk pertumbuhan (logaritma) dan diturunkan terhadap waktu maka akan didapatkan pertumbuhan ekonomi daerah seperti pada persamaan (2) dibawah :

Berdasarkan persamaan (2) diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung akan faktor perubahan akan teknologi dan perubahan akan modal atau kapita. Perubahan teknologi menurut Lin dan Liu (2000) tidak hanya merefleksikan perubahan teknologi akan tetapi juga perbedaan dalam sumber daya alam dan pemerintahan daerah. Menurut Lin dan Liu perubahan akan variabel teknologi salah satunya adalah tergantung akan variabel desentralisasi fiskal. Zhang dan Zou (2001) mengemukakan pendekatan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh belanja publik yang dilakukan dikeluarkan. Sehingga regresi panel yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut :

Dimana  $Y_{it}$  adalah pertumbuhan ekonomi daerah,  $a$  adalah konstanta,  $b$ ,  $c$ , dan  $d$  koefisien regresi,  $DAU_{it}$  jumlah DAU masing-masing provinsi,  $PAD_{it}$  jumlah PAD masing-masing provinsi,  $BM_{it}$  adalah belanja modal masing-masing provinsi dan  $\varepsilon_{it}$  merupakan *error term*,  $i$  adalah

seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi di Provinsi Sumatera Utara ,  $t$  adalah periode waktu, tahun 2006 sampai 2015.

## B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus untuk melakukan analisis terhadap permasalahan. Pendekatan yang dipakai yaitu metode kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab permasalahan penelitian diatas. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan perkembangan pendapatan dan belanja di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sementara itu pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam konteks penelitian ini maka yang akan diangkat dan disajikan adalah tentang pengaruh DAU yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap pertumbuhan ekonomi daerah studi Provinsi Sumatera Utara.

Data yang telah terkumpul melalui serangkaian teknik pengumpulan data di atas akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahap pertama adalah analisis dengan metode kualitatif, ada tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data dilakukan agar data yang berasal dari berbagai sumber tersebut dapat dipahami. Oleh karena itu, dalam reduksi data ini peneliti berupaya melakukan *editing* dan *kategorisasi* data sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya dilakukan penyajian data dan penarikan simpulan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Sumatera Utara

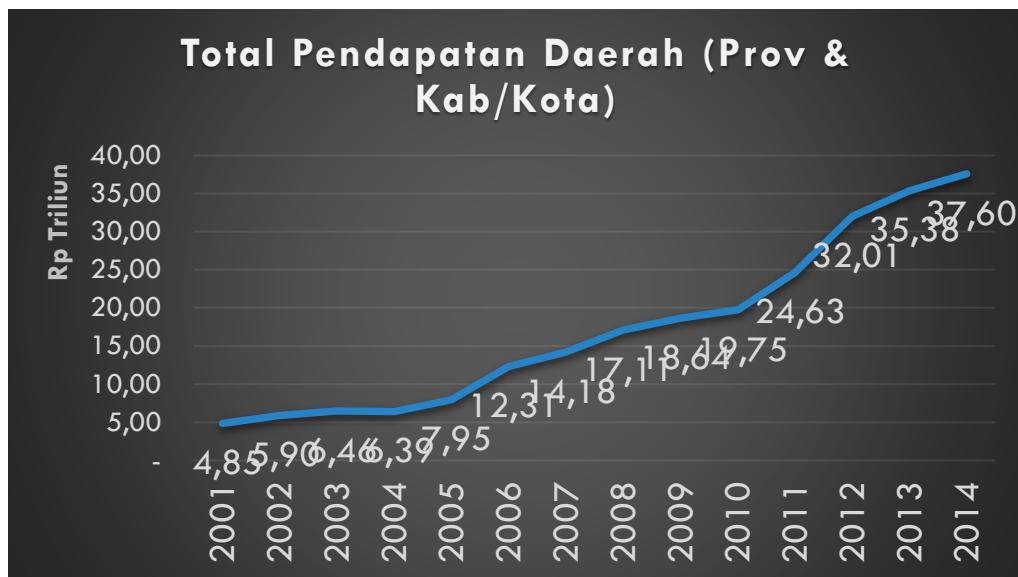
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, APBD merupakan Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyusunannya, keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara tentunya perlu diperhatikan.

Berikut akan diuraikan mengenai Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Sumatera Utara.

#### **A.1. Pendapatan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara**

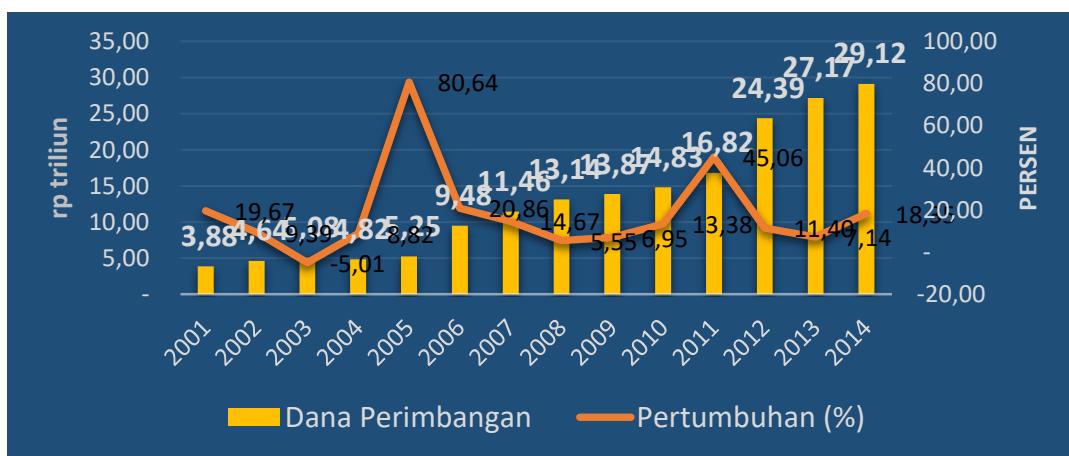
APBD Kabupaten/ Kota Sumatera Utara terdiri dari bagian Pendapatan dan Pengeluaran. Bagian Pendapatan terdiri dari PAD dan Bagian Dana Perimbangan. Pada bagian awal gambaran umum mengenai keuangan daerah Pemerintah Sumatera Utara akan dibahas mengenai perkembangan pendapatan atau penerimaan yang didapatkan oleh Pemerintah Sumatera Utara (Sumut). Secara definsi berdasarkan peraturan yang berlaku, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan daerahnya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Utara, realisasi penerimaan pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 mengalami trend yang cukup meningkat. Jika pada tahun 2004 besaran realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp4,85 triliun maka pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 675% menjadi Rp37,6 trilun (Lihat Gambar 3). Dalam kurun waktu 13 tahun, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah total Provinsi, Kabupaten dan Kota Sumatera Utara sebesar 51,9% / tahun.

**Gambar 3. Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2001-2014**

Sumber : BPS (2016).

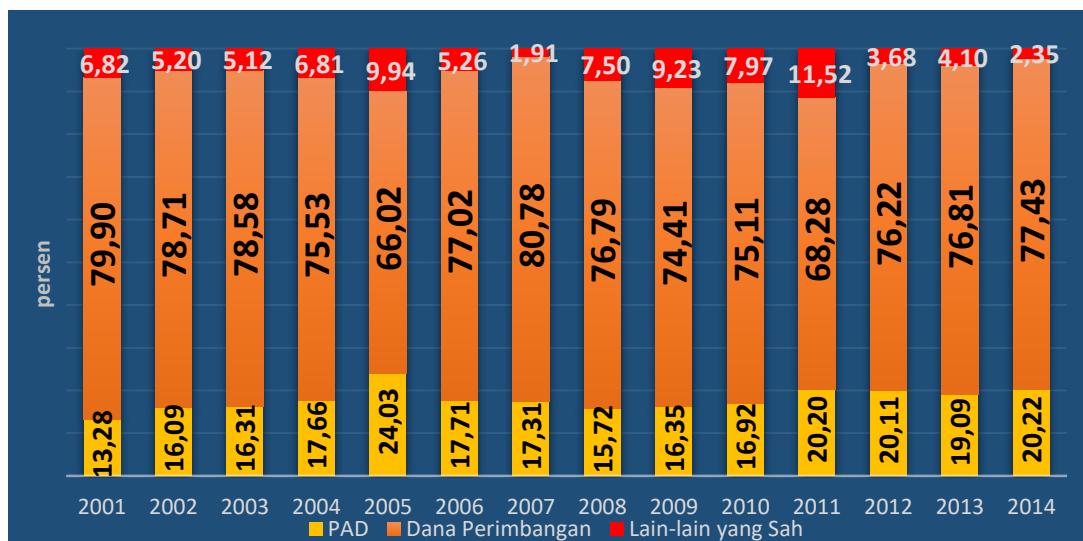
Sedangkan jika diteliti lebih lanjut mengenai pendapatan Provinsi Sumatera Utara khususnya yang berasal dari Dana Perimbangan, juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dari awal otonomi daerah tahun 2001. Pada tahun 2001 dana perimbangan yang diberikan kepada Provinsi, Kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebesar Rp3,88 triliun, akan tetapi mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 650% pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp29,12 triliun. Maka secara rata-rata pertumbuhan dana perimbangan untuk Sumatera Utara dapat diperoleh sebesar 18,35% / tahun (lihat Gambar 4).

**Gambar 4. Perkembangan Dana Perimbangan Untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Sumatera Utara Periode Tahun 2001-2014.**

Sumber : BPS (2016)

Lebih lanjut mengenai dana perimbangan, ditelaah lebih lanjut Provinsi Sumatera Utara baik itu tingkatan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup rendah. Tingkat kemandirian fiskal tersebut dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 masih mengalami stagnasi pertumbuhan PAD. Berdasarkan Gambar 5. dapat dilihat secara jelas bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) masih sangat ditopang oleh dana perimbangan khususnya dana perimbangan yang berasal dari DAU. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di daerah.

**Gambar 5. Komposisi PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah di Sumatera Utara  
(Provinsi/Kabupaten/Kota)**



Sumber : BPS (2016).

Sementara itu, data tahun 2015 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tahun 2015 masih belum banyak berubah dari periode yang sama tahun yang lalu, yaitu 81% ditopang oleh transfer berupa dana perimbangan. Realisasi PAD 17 dari 33 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara mencapai Rp1,4 triliun atau hanya 89% dari targetnya. Realisasi PAD tertinggi dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 137% dari target, sementara terendah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Asahan hanya sebesar 46% dari targetnya. Realisasi PAD tersebut tidak lepas dari penerimaan pajak yang merupakan komponen utama dari PAD tersebut.

## A.2. Belanja Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Data dari BPS (2015) dari 33 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan daerah dengan belanja daerah terbesar dengan total belanja Rp4,8 triliun. Diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang dengan total belanja daerah Rp3,26 triliun, sedangkan daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki belanja terkecil adalah Kota Tanjungbalai dengan nilai sebesar Rp73,6 miliar. Sementara itu berdasarkan rasio antara belanja langsung pemerintah dibandingkan dengan belanja tidak langsung pemerintah, Kabupaten Nias Selatan memiliki proporsi yang cukup tinggi dibandingkan 32 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan rasio sebesar 2,3. Sementara itu Kabupaten Nias Utara dan Nias merupakan urutan ke-2 dan ke-3 yang memiliki rasio yang cukup besar antara belanja langsung dibandingkan belanja tidak lansung.

Belanja daerah 17 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebesar Rp17,1 triliun atau 95,7% dari anggaran belanja tahun 2015. Sebagaimana pendapatannya, realisasi belanja tersebut juga secara nominal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang secara nominal tercatat sebesar Rp15,2 triliun. Namun secara persentase masih dibawah realisasi tahun 2014 yang mencapai sebesar 97,1% dari pagu anggaran. Rendahnya realisasi belanja tahun 2015 tidak terlepas dari kondisi politik terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 dan terlambatnya persetujuan Perubahan APBD tahun 2015.<sup>18</sup> Komponen belanja yang terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai sebesar Rp9 triliun (52,7% dari total anggaran), diikuti oleh belanja modal Rp3,6 triliun (21,5% dari total anggaran), dan belanja barang dan jasa yang mencapai Rp2,8 triliun (16,8% dari total anggaran).

Dari sisi kualitas belanja seperti yang telah diuraikan diatas, hampir semua baik Provinsi maupun Kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara sebagian besar belanja pemerintah masih terfokus kepada belanja operasional dan proporsi belanja modal yang masih relatif rendah. Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2014 sebanyak 15 daerah menaikkan belanja operasionalnya, 14 daerah menurun dan 5 daerah relatif stabil. Hanya beberapa kabupaten seperti Nias Barat, Labusel, Gunung Sitolo, Nias Utara, dan Nias memiliki rasio belanja operasional dibawah 65%.<sup>19</sup>

Secara umum sebagian besar belanja pemerintah daerah masih terfokus kepada belanja operasionalnya seperti gaji Pegawai, belanja barang sedangkan belanja modalnya masih kecil. Hal ini bisa terlihat dari 33 Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di Provinsi Sumatera Utara

<sup>18</sup> Hasil diskusi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Agustus 2016.

<sup>19</sup> Hasil FGD dengan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario P, tanggal 3 Agustus 2016.

rata-rata rasio belanja operasional berada diatas 65%. Pemerintah Daerah bahkan memiliki rasio belanja operasional rata-rata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar 86,12%. Kemudian Kota Siantar memiliki proposi belanja operasional sebesar 83,69% pada periode yang sama (Lihat Lampiran 1.). Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Utara masih kurang fokus kepada belanja langsung seperti belanja modal. Karena hampir sebagian besar belanja langsung terutama belanja modal dapat langsung berdampak terhadap masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

### **A.3. Permasalan yang Dihadapi Pemerintah Sumatera Utara dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi**

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai Provinsi Sumatera Utara, beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Sumatera Utara dalam memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Kualitas Belanja pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang masih relatif kurang berkualitas. Secara umum, sebagian besar belanja pemerintah daerah masih terfokus kepada belanja operasional (seperti contohnya gaji pegawai, belanja barang, dll) sedangkan belanja modalnya masih relatif kecil.
2. Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/Kota yang relatif memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Dari beberapa Kabupaten/Kota tersebut lebih dari 50% masih sangat bergantung kepada *fiscal transfer* dari Pemerintah Pusat dan memiliki PAD yang relatif rendah. Data hasil pengolahan menunjukkan bahwa hanya 10 Kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal yang sedang dan tinggi, sisanya memiliki kapasitas fiskal rendah.
3. Kondisi infrastruktur belum memadai untuk memacu pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Ketersediaan listrik menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi kondisi jalan yang rusak berat (239 km).
4. Tata kelola pemerintah dan penegakan hukum masih perlu diperbaiki. Indeks korupsi yang masih rendah, perizinan masih berbelit karena kurangnya kualitas pelayanan aparatur serta ekonomi biaya tinggi.
5. Produktivitas sektor pertanian masih rendah. Sebagai salah satu penopang utama perekonomian Provinsi Sumatera Utara, produktivitas sektor ini masih relatif rendah.

---

<sup>20</sup> Merupakan rangkuman Hasil FGD dengan FE Universitas Sumatera Utara, diskusi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan Diskusi dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara tanggal 25 Juli – 4 Agustus 2016.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif rendah. Rata-rata kualitas sumber daya masih lulusan SMP ke bawah termasuk rendah.
7. Daya dukung lingkungan yang berkurang. Pertumbuhan sektor perkebunan dan industri yang sangat pesat di Sumatera Utara diiringi dampak negatif yaitu memburuknya daya dukung lingkungan. Rendahnya daya dukung lingkungan mengancam keberlanjutan pertumbuhan, apalagi untuk perekonomian yang masih bertumpu pada sumber daya alam dan jasa lingkungan.

## **B. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara**

Pada bagian berikut akan dibahas mengenai pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui pengaruh tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data yang digunakan bersumber dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan BPS.

Maka langkah pertama adalah menentukan metode estimasi *fixed effect* dengan *cross section weight*, dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan pengujian sebagai berikut: untuk pemilihan metode estimasi untuk penggunaan metode *individual effect* atau *common effect* dilakukan dengan uji F.

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n \text{ (intersep sama/ common effect)}$$

$$H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n \text{ (individual effect)}$$

$$F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)} = \frac{(0,983 - 0,923)/2}{(1 - 0,983)/(30 - 5)} = 44,117$$

Berdasarkan rumus diatas didapatkan nilai F-hitung sebesar 44,117, sementara nilai F tabel sebesar 2,40. Maka  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak, yang menyatakan bahwa intersep adalah sama yaitu dengan metode *common effect*, dan metode yang lebih baik adalah metode estimasi dengan *individual effect*, di mana intersep antar individu berbeda.

Maka untuk menetukan model estimasi terbaik dengan menggunakan *Hausment Test*, didapatkan hasil sebagai berikut :

## Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: TB

Test cross-section and period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37,850470	2	0,0000

Sumber : Eviews versi 6.0 diolah (2016).

Dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 maka  $H_0$  (model *random effect*) ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah model efek tetap (*fixed effect*)

Setelah dilakukan pemilihan model efek tetap (*fixed effect*) maka langkah selanjutnya adalah melakukan regresi data panel. Maka didapat model estimasi terbaik adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Regresi Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel Dependen	Koefisien	t-Statistic
C	3,423	1,979*
Log(DAU)	0,010	3,243*
Log(PAD)	1,250	0,615
Log(BM)	0,041	2,143*
Statistics		
R-Squared		0,786
F-Statistic		86,54
Prob(F-statistic)		0,000
Durbin-Watson Stat		1.954

\*Signifikan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ 

Sumber : Hasil Pengolahan data (2016).

Tabel 1. menunjukkan hasil estimasi data panel terhadap model persamaan regresi data panel terhadap variabel independen, yakni pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji F, untuk menguji signifikansi dari model terhadap masing-masing dapat terlihat pada Tabel 1. Berdasarkan uji F pengaruh pertumbuhan DAU, PAD dan belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki Probabilitas (F-stat)  $0,0000 < \alpha = 5\%$ . Namun berdasarkan hasil regresi data panel diatas, hanya variabel pertumbuhan DAU dan BM yang signifikan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel pertumbuhan PAD tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nilai R-squared sebesar 0,786 artinya model secara representatif dapat menjelaskan keragaman variabel dependen sebesar 78,6 persen.

Hasil analisa regresi data panel terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan hasil sebagai berikut. Variabel pertumbuhan DAU dan pertumbuhan belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap kenaikan pertumbuhan DAU 1 persen akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,010 persen, *ceteris paribus*. Sementara itu, setiap terjadi kenaikan 1 persen pertumbuhan belanja modal (BM) akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,041 persen, *ceteris paribus*. Sementara itu variabel pertumbuhan PAD tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kresnandra (2012) yang menemukan bahwa berdasarkan sampel Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali hubungan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut N.Akai *et al.* (2007) yang melakukan penelitian terhadap 50 negara bagian di Amerika Serikat dengan periode waktu 1992-1997. Hasil penelitian menemukan bahwa *fiscal decentralization* melalui pemberian dana kepada pemerintah daerah terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara bagian di Amerika Serikat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pepinsky dan Maria (2011) tentang desentralisasi dan kinerja perekonomian di Indonesia menemukan bahwa desentralisasi fiskal yang diberikan kepada daerah ternyata memberikan dampak yang beragam terhadap kinerja perekonomian daerah. Ada daerah yang setelah diberikan dana transfer fiskal ternyata dapat memacu pertumbuhan ekonomi, namun ada juga daerah yang setelah diberikan transfer fiskal tidak berdampak terhadap kinerja Penelitian yang dilakukan oleh Matinez dan McNab (2003) menemukan bahwa pemberian desentralisasi fiskal terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini Matinez dan McNab (2003) sejalan dengan hasil penelitian Normal *et al.* (2013) mengemukakan berdasarkan data panel dari 23 negara *Organization for Economics Co-operation and Development* (OECD) periode waktu 1972-2005 menemukan bahwa efek desentralisasi fiskal terutama efek penerimaan desentralisasi fiskal yang diterima memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Ginting (2012) biasanya peningkatan penerimaan DAU memang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap

belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau sering disebut sebagai *flypaper effect*. Namun penekanannya adalah bagaimana pemberian dana transfer fiskal tersebut dapat menstimulus pertumbuhan perekonomian daerah melalui belanja yang berkualitas.

Akan tetapi lebih lanjut Celine dan Jaime (2012) mengemukakan bahwa dampak positif desentralisasi fiskal tersebut terletak kepada keputusan *fiscal spending* yang tepat yang dapat mendorong perekonomian. Berdasarkan data dari 140 negara dari periode tahun 1972-2005 belanja fiskal pemerintah daerah harus kepada alokasi yang tepat sasaran untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berlaku juga untuk provinsi, yaitu Pemerintah Sumatera Utara. Pemberian dana desentralisasi fiskal menurut Zhang dan Zou (1998) dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dengan syarat bahwa alokasi belanja pemerintah daerah harus tepat sasaran mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perekonomiannya.

Salah satu kunci bagi belanja yang tepat sasaran dan tepat guna adalah pemerintah daerah harus lebih banyak melakukan belanja kepada belanja publik atau *public investment*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998) mengemukakan bahwa belanja publik terutama belanja infrastruktur memberikan dampak yang sangat besar dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan paparan diatas, jika melihat struktur belanja pada pemerintah Sumatra Utara menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah Sumatera Utara masih berkutat kepada belanja operasional seperti gaji pegawai dan belanja barang.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Penelitian ini mencoba melakukan analisis perkembangan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Sumatera Utara. Hasil yang didapatkan bahwa porsi dana perimbangan khususnya DAU masih menjadi sumber utama penerimaan pemerintah Sumatera Utara sedangkan porsi PAD masih memegang peranan yang masih relatif kecil. Sementara itu dari sisi belanja daerah, pemerintah Sumatera Utara masih menerapkan pola belanja yang konvensional, dimana kualitas belanja yang masih sangat besar pada belanja operasional seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang. Padahal yang dibutuhkan masyarakat dan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja yang berkualitas dan berfokus kepada belanja modal.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisa regresi data panel menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan DAU dan pertumbuhan Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Sumatera Utara. Kondisi ini cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di wilayah Pemerintah Sumatera Utara sangat tergantung terhadap DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Utara juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan Belanja Modal yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka belanja pemerintah daerah harus dialokasikan kepada belanja modal yang terbukti bermanfaat dan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin banyak belanja modal yang dikeluarkan maka akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara perlu melakukan *shfitting political will* dari belanja yang pemerintah daerah yang awalnya kurang berkualitas kerena lebih banyak belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Poin berikutnya yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara adalah diperlukannya usaha yang lebih serius untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi *Good Governance*. Pengalaman empirik membuktikan sudah beberapa kali kepala daerah di Sumatera Utara diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, diperlukan usaha lebih dari pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih lagi diperlukannya penyederhanaan perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan aparatur terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Jika semua pemerintah Kabupaten/ Kota telah melakukan praktik *Good Governance* dalam pemerintahan dan sudah dapat mewujudkan penyederhanaan perizinan dan pelayanan apartur yang baik maka diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priyo Hadi. 2008. Relevansi transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota sej Jawa). *The Second National Conference UKWMS*. Surabaya
- Agus Subroto. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi DanaDesa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol.3(2) Hlm. 44-63
- Ari Mulianta Ginting. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi di Pulau Jawa. *Kajian*. Vol.17(3). Hlm. 357-382.
- Aridian Suntoro Eko, Dwipayana. (2003). *Membangun Goood Gocernance di Desa* . Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. 3<sup>rd</sup> ed. John Wiley & Son. Chichester.
- Bank Indonesia. (2016). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV 2015*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
- BPS. 2016. *Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2016*. Medan : BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Celine Carrere dan Jaime de Melo. (2012). Fiscal Spending and Economic Growth : Some Stylized Facts. *World Development*. Vol.40(9). Hlm 1750-1761
- Deller, Steven,Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. *Wisconsin Local Government, State Share Revenue and The Illusive Flypaper Effect*, University of Wisconsin-Madison, working paper.
- “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya”, Diunduh dari <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46912>, tanggal 6 Juni 2016
- Fischer, Ronald C. 1996. *State And Local Public Finance*. Chicago: Irwin, Inc
- Gregory N. Mankiw, David Romer dan David N. Weil. 1992. A Contribution to the Empiric of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economic*. Vol. 107. Hlm 407-437
- “Hapus Ketimpangan Daerah, Dana Alokasi Umum Dinaikkan”, Okezone tanggal 8 Setepmber 2015. (Diunduh dari <http://economy.okezone.com/read/2015/09/08/20/1210338/hapus-ketimpangan-daerah-dana-alokasi-umum-dinaikkan>, tanggal 7 April 2016
- Jorge Martinez-Vazquez dan Robert M. McNab. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*. Vol.31(9). Hlm 1597-1616

Justin Yifu Lin dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. Vol 49(1). Hlm 1-21

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. Vol 49(1). Pp 1-21

Maimunah Mutiara. 2006. *Flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi. Padang 23-26 Agustus 2006

Mandala Harefa. 2010. Implementasi Transfer Dana Perimbangan dan Implikasinya. *Kajian*. Vol 15(4). Hlm. 1-26

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Michael Todaro. 2000. *Economic Development 7th Edition*. New York : New York University, Addison Mesley

Nobou Akai, Yukihiko Nishimura, dan Masayo Sakata. 2007. Complementary, Fiscal Decentralization and Economic Growth. *Economics of Governance*. Vol.8(4). Hlm. 339-362

Normal Gemmell, R Kneller dan I Sanz. 2013. Fiscal Decentralization and Economic Growth : Spending versus Revenue Decentralization. *Economic Inquiry*. Vol. 51(4). Hlm. 1915-1931

Pepisky, Thomas B dan Wihardja, Maria. 2011. Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*. Vol 11(3). Hlm 337-371

Sandhi Wijaya. 2008. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (Studi pada Kabupaten Pekalongan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Sudirman. Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : Andi

Tao Zhand dan Heng-fu Zou. 1998. Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*. Vol.67. Hlm. 224-240

Tao Zhand dan H. Zou. 2001. The growth impact of intersectoral and intergovernmental allocation of public expenditure. With applications to China and India. *China Economic Review*. Vol.12(1). Hlm. 58-81

"Terima suap, 7 Anggota DPRD Sumatera Utara ditahan KPK", Tempo.co.id, 5 Agustus 2016. Diunduh tanggal 21 November 2016

Tulus Tambunan. 2011. *Perekonomian Indonesia : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Ghalia Indonesia

Ulfie Maryati dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 5(2). Hlm. 66-84

**LAMPIRAN :****1. Kualitas Belanja Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara**

<b>Wilayah</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Keterangan</b>
Provinsi Sumut	88,62	88,70	81,14	86,15	Turun
Asahan	75,01	76,23	69,30	73,51	Turun
Batubara	73,67	73,02	73,20	73,30	Stabil
Binjai	75,66	81,03	80,89	79,19	Naik
Dairi	82,95	79,31	78,62	80,29	Turun
Deli Serdang	81,36	82,39	76,55	80,10	Turun
Gunung Sitoli	62,54	62,56		62,55	Turun
Humbanghas	75,52	68,18	67,42	70,37	Turun
Karo	79,58	72,78	82,48	78,28	Naik
Labuhanbatu	72,93	72,48	76,28	73,90	Naik
Labura	62,37	61,57	71,57	65,17	Naik
Labusel	66,56	53,12	63,02	60,90	Turun
Langkat	80,81	79,98	79,45	80,08	Stabil
Madina	82,11	83,09	81,26	82,15	Stabil
Medan	81,51	80,42	78,92	80,28	Turun
Nias Barat	61,05	54,99	58,50	58,18	Turun
Nisel	67,43	68,81	68,10	68,11	Naik
Nias Utara	67,51	58,29		62,90	Turun
Nias	62,07	63,60	69,14	64,94	Naik
P. Sidimpuan	81,27	80,94	84,41	82,21	Naik
Pakpak Bharat	76,31	61,25	64,97	67,51	Turun
Padang Lawas	73,40	72,72	70,63	72,25	Turun
Paluta	59,24	67,15	79,49	68,63	Naik
P. Siantar	85,26	81,45	84,36	83,69	Stabil
Samosir	78,50	67,91	69,70	72,04	Turun
Sergei	81,89	74,34	81,77	79,33	Stabil
Sibolga	78,05	80,69	79,68	79,47	Naik
Simalungun	76,35	83,07	85,99	81,80	Naik
Tj. Balai	74,41	76,82	75,23	75,49	Naik
Tapsel	71,27	68,25	72,95	70,82	Naik
Tapteng	77,31	69,47	86,46	77,75	Naik
Taput	76,43	74,72	81,14	77,43	Naik
Tebing Tinggi	79,46	72,50	73,49	75,15	Turun
Tobasa	74,97	80,15	79,01	78,04	Naik